

7-2021

Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?

Abdurrahman Abdurrahman

BPS-Provinsi Kalimantan Selatan, abdurrahmans2kk@yahoo.co.id

Ema Tusianti

BPS-Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, ema.tusianti@yahoo.co.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi>



Part of the [Macroeconomics Commons](#), and the [Political Economy Commons](#)

Recommended Citation

Abdurrahman, Abdurrahman and Tusianti, Ema (2021) "Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: Vol. 21: No. 2, Article 5.

DOI: 10.21002/jepi.2021.13

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol21/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?

Does Empowerment of Women in Economy and Politics Have Enhanced HDI of Indonesian Women?

Abdurrahman^{a,*}, & Ema Tusianti^b

^aBPS-Provinsi Kalimantan Selatan

^bBPS-Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

[diterima: 18 September 2019 — disetujui: 4 Desember 2019 — terbit daring: 31 Juli 2021]

Abstract

Gender Development Index (GDI) shows that gender development inequality in Indonesia is still high because of lower female Human Development Index (HDI) than that of male. This research is pointed to analyse the impact of women empowerment on economy and politics to female HDI. By using multiple linear regression model and harnessing data of 514 regencies/municipalities, this research reveals that share of women on parliament, women on professional work, and women as entrepreneurs simultaneously affects women HDI in Indonesia.

Keywords: *women empowerment; women quality of life; politics; economy; HDI*

Abstrak

Angka *Gender Development Index (GDI)* menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami ketimpangan pembangunan gender. Salah satu penyebabnya karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan masih jauh dari IPM laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik dapat meningkatkan IPM perempuan Indonesia. Dengan menggunakan model regresi linier berganda, penelitian terhadap 514 kabupaten/kota menunjukkan bahwa besarnya kontribusi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga kerja profesional, dan perempuan sebagai pengusaha secara signifikan meningkatkan IPM perempuan di Indonesia.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan; kualitas perempuan; politik; ekonomi; IPM

Kode Klasifikasi JEL: I31; J16; O15

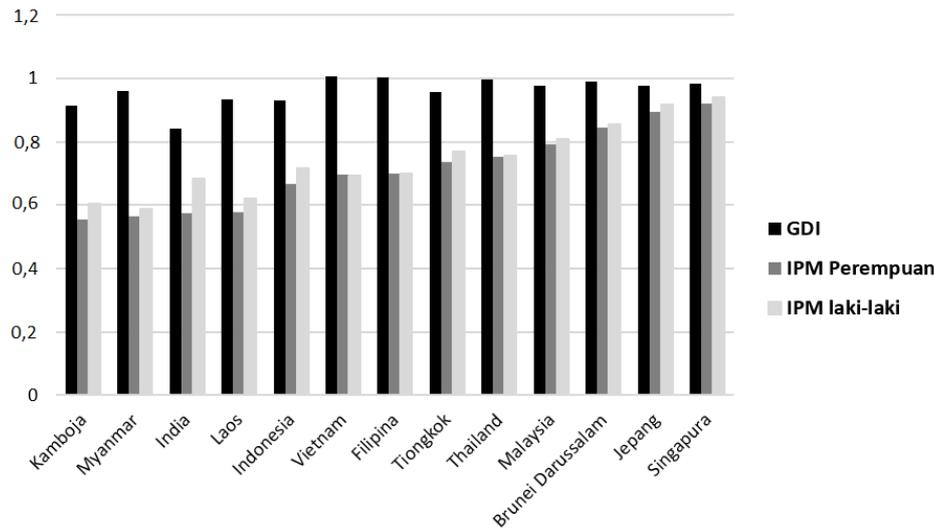
Pendahuluan

Ketimpangan gender di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Perempuan masih mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tergambarkan dari ukuran *Gender Development Index (GDI)* yang menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang mengembirakan. Perlambatan angka *Human Development Index (HDI)* perempuan atau di Indonesia dikenal dengan Indeks Pemba-

ngunan Manusia (IPM) adalah faktor yang menyebabkan GDI Indonesia berada di bawah rata-rata dunia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik [KPPPA & BPS], 2018). Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas perempuan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Di lingkup *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* saja, IPM perempuan Indonesia masih tertinggal oleh Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam (Gambar 1).

Salah satu latar belakang utama tertinggalnya IPM perempuan di Indonesia dibandingkan negara

*Alamat Korespondensi: Jln. Soekarno Hatta No. 7 Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 70714. E-mail: abdurrahmans2kk@yahoo.co.id.



Gambar 1. GDI dan IPM Perempuan dan Laki-Laki Beberapa Negara Asia

Sumber: *Human Development Indices and Indicators (United Nations Development Programme [UNDP], 2018)*

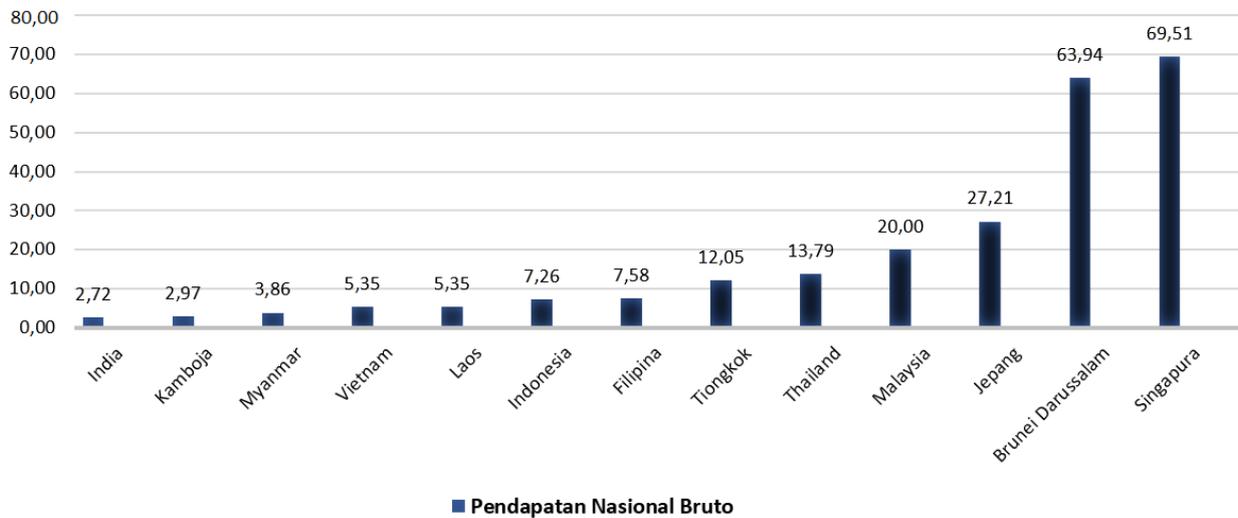
lain adalah masih rendahnya kontribusi perempuan dalam ekonomi. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang dihasilkan kaum hawa di Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan bahkan Filipina. Jika dibandingkan dengan negara terdekat, PNB perempuan Indonesia hanya sekitar sepertiga dari PNB perempuan Malaysia (Gambar 2).

Faktor selanjutnya adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik (politik). Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal, dan memengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender (Rahmaniah, 2016). Di tingkat nasional, pada tahun 2017, wakil perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 17,32 persen. Bahkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berada pada angka yang lebih rendah, rata-rata 14,32 persen. Angka ini masih jauh dari harapan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamatkan minimal 30 persen wakil perempuan di parlemen (DPR maupun Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah [DPRD]). Faktanya, hanya 6,33 persen daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang memenuhi amanat undang-undang tersebut.

Selain itu, dalam jabatan administrasi pemerintahan, peran perempuan belum begitu signifikan. Misalnya dalam wilayah administrasi pemerintah terkecil, perempuan yang menjadi kepala desa masih sedikit. Menurut Dewi (2017), kepala desa perempuan berperan penting dalam memberdayakan perempuan di desa yang dipimpinnya karena turut merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan lainnya. Pada beberapa kajian, partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kondisi *outcomes* perempuan, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan (Chattopadhyay & Duflo, 2004; Gerrity *et al.*, 2007; Choudhary, 2010; Beaman *et al.*, 2012).

Berbagai kebijakan sejatinya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pencapaian kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Namun, hasilnya dinilai belum optimal. Kondisi ini makin diperparah dengan masalah kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Pada situasi seperti ini, pemberdayaan perempuan mut-



Gambar 2. PNB Perempuan di Beberapa Negara di Asia (Ribu US\$ *Purchasing Power Parities* [PPP])
 Sumber: *Human Development Indices and Indicators* (UNDP, 2018)

lak untuk ditingkatkan, baik di bidang ekonomi maupun politik. Oleh sebab itulah, pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, kesetaraan gender telah ditetapkan sebagai 1 dari 6 pengarusutamaan (*mainstreaming*). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas], 2019).

Dengan melihat latar ini, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik begitu penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan kualitas perempuan secara umum (makro). Sayangnya, hanya sedikit penelitian yang secara khusus melihat hubungan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkup ekonomi dan politik terhadap IPM perempuan. Choudhary (2010) hanya melihat dampak perempuan sebagai kepala negara terhadap IPM penduduk secara keseluruhan. Rizqi & Tusianti (2019) menganalisis pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi saja.

Asiedu *et al.* (2007) mengkaji pengaruh pemberdayaan perempuan dalam parlemen terhadap kebijakan pro perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian dirumuskan dengan tujuan untuk melihat kondisi pemberdayaan perempuan Indonesia dari aspek ekonomi dan politik dan melihat seberapa besar dampak atau pengaruhnya terhadap kualitas perempuan secara makro yang diukur melalui IPM. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini dalam dunia akademis adalah memberikan referensi ilmiah mengenai pengaruh pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan di dunia politik dan ekonomi terhadap IPM dengan cakupan data yang lengkap, yakni mencakup seluruh kabupaten/provinsi di Indonesia.

Pemberdayaan memberikan kekuasaan atau otoritas dan/atau kebebasan yang lebih luas kepada seseorang terhadap pilihan dan aktivitasnya (Yogendrarajah, 2013; Thanikaivel & Priya, 2018). Dalam konteks ini, kesetaraan pemberdayaan gender ditujukan untuk tercapainya kesamaan akses laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelibatan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup publik maupun domestik.

Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan ruang publik. Ketimpangan tidak boleh terjadi karena perempuan merupakan penghuni dari separuh dunia (*United Nations* [UN], 2014).

Dalam aspek politik, keterlibatan perempuan dalam parlemen merupakan salah satu bentuknya. Masalah dan persoalan-persoalan yang dialami perempuan dapat disuarakan dan diselesaikan, termasuk urusan kesejahteraan perempuan yang dipandang belum merata dan setara dengan laki-laki. Untuk mengakomodir hak perempuan di parlemen, lahirlah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menerapkan kebijakan minimal 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal, dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender (Rahmaniah, 2016).

Secara lebih luas, keberadaan perempuan dalam pemerintahan dan kepemimpinan dapat memberikan aspirasi bagi perempuan muda agar meningkatkan capaian pendidikannya (Beaman *et al.*, 2012). Perempuan sebagai kepala desa cenderung memprioritaskan investasi barang publik bagi kaumnya (Chattopadhyay & Duflo, 2004). Perempuan di kursi legislatif dapat menghasilkan hukum dan peraturan yang komprehensif membela kaumnya, seperti pada kajian Asiedu *et al.* (2007). Kepala negara perempuan cenderung dapat meningkatkan IPM penduduknya dibandingkan dengan kepala negara laki-laki (Choudhary, 2010).

Dalam bidang ekonomi, perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, baik sebagai pengusaha ataupun bagian dari tim manajerial. Memberikan

akses kepada perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam area publik, termasuk dunia kerja, bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri juga untuk meningkatkan persaingan. Dengan kehadiran kaum hawa, maka dunia kerja lebih berwarna. Pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif terutama untuk menghadapi globalisasi (Seguino, 2000; *World Bank*, 2011). Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Penelitian Klasen & Lamanna (2009) memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja menghambat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan.

Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan sebuah proses agar perempuan memiliki daya untuk menjadi "*bread winner*" sehingga mampu menghilangkan ketergantungan ekonomi dan melepaskan dari jerat kemiskinan (Elliott, 2008). Sementara itu, pemberdayaan dalam politik bermakna proses untuk meningkatkan ketertarikan perempuan dalam dunia politik dan berperan serta dalam pengambilan keputusan (*World Bank*, 2011).

Pemberdayaan perempuan merupakan alat agar perempuan menjadi lebih berkualitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang masih berada di tingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi yang produktif dan juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam kelembagaan masyarakat, baik yang bertindak sebagai aparatur pemerintahan dan juga masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis terhadap 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai unit observasinya. *Pertama*, analisis deskriptif yang berguna untuk melihat sebaran IPM perempuan dan pemberdayaan perempuan pada aspek ekonomi dan politik. *Kedua*, analisis inferensia dengan menggunakan regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor pemberdayaan yang memengaruhi IPM perempuan di Indonesia.

Analisis regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas dalam membuat pemodelan atau persamaan regresinya. Penggunaan lebih dari satu variabel bebas dalam pembuatan persamaan regresi linier dimaksudkan agar persamaan regresi linier yang dihasilkan lebih mampu menerangkan atau menjelaskan karakteristik dari variabel tak bebasnya. Bentuk umum model regresi linier berganda yang menggunakan lebih dari dua variabel bebas adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_i = a + b_1X_{1i} + b_2X_{2i} + b_3X_{3i} + \dots + b_kX_{ki} + e_i \quad (1)$$

dengan \hat{Y}_i adalah nilai penduga atau estimasi dari Y_i ; a adalah konstanta dari persamaan regresi; b adalah nilai koefisien regresi; X merupakan variabel bebas; e adalah galat atau *error*; sedangkan i bergerak dari 1,2,3 hingga ke- n observasi.

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 4 variabel yang terdiri dari 1 variabel terikat atau tak bebas dan 3 variabel bebas. Bentuk persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut:

$$y_i = a + b_1iX_{1i} + b_2X_{2i} + b_3X_{3ic} + e_i \quad (2)$$

dengan y adalah IPM perempuan tahun 2017; X_1 adalah persentase pengusaha perempuan tahun 2017; X_2 adalah persentase perempuan di parlemen tahun 2017; X_3 adalah persentase perempuan se-

bagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi tahun 2017; a menunjukkan konstanta persamaan regresi; b_1, b_2, b_3 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel bebas; dan i bergerak dari 1, 2, 3, hingga 514.

Variabel yang terdapat pada Persamaan (2) tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. y_i adalah variabel IPM perempuan tahun 2017 yang didefinisikan sebagai besarnya nilai IPM perempuan pada tahun 2017 untuk setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. IPM merupakan proksi yang menggambarkan kualitas hidup. UNDP (1996) menyebutkan IPM sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup yang terbentuk dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Data IPM dihitung oleh BPS dan dirilis di www.bps.go.id.
2. X_1 adalah variabel persentase pengusaha perempuan tahun 2017 yang didefinisikan sebagai persentase pengusaha yang berjenis kelamin perempuan terhadap total pengusaha pada tahun 2017 untuk setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data ini bersumber dari hasil *Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan* yang dilaksanakan pada tahun 2017 oleh BPS. Variabel ini merupakan pendekatan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.
3. X_2 adalah variabel persentase perempuan di parlemen pada tahun 2017 yang didefinisikan sebagai persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD terhadap total anggota DPRD pada tahun 2017 untuk setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data ini dikutip dari *website* www.bps.go.id. Bagi BPS, data ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Variabel ini merupakan pendekatan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.
4. X_3 adalah variabel persentase perempuan se-

bagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi tahun 2017 yang didefinisikan sebagai perbandingan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi terhadap total perempuan pada tahun 2017. Angka ini dihitung oleh BPS yang bersumber dari hasil *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*. Data ini didapatkan dari website resmi BPS. Variabel ini juga merupakan pendekatan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2017 karena kondisi terakhir untuk semua variabel secara lengkap saat penelitian ini dilakukan adalah kondisi tahun tersebut.

Pengujian Asumsi Klasik

Penggunaan metode analisis regresi linier berganda memerlukan pemeriksaan asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik harus terpenuhi agar penduga parameter regresi bersifat *Best Linear Unbiased Estimate (BLUE)* atau bersifat linier, tidak bias, dan variannya minimum. Pemeriksaan asumsi tersebut meliputi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan asumsi linieritas. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi karena uji ini diterapkan pada data *time series*, sedangkan penelitian ini menggunakan data *cross section*.

Uji pertama adalah pemeriksaan multikolinieritas. Multikolinier merupakan suatu keadaan yang menunjukkan terdapat korelasi atau hubungan linier yang terjadi di antara variabel-variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam model regresi. Seluruh variabel-variabel bebas tersebut harus bersifat ortogonal, yaitu variabel bebas yang memiliki nilai korelasi sama dengan nol di antara sesama variabel bebas. Uji ini mutlak dilakukan sebelum menggunakan model persamaan regresi linier untuk analisis selanjutnya. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah pada model yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antarvariabel bebas. Cara yang

digunakan untuk mengetahui telah terjadi multikolinieritas atau tidak dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Variation Inflation Factor (VIF)* yang dihitung menggunakan program SPSS. Jika nilai VIF dari variabel bebas tersebut lebih besar dari sama dengan 10, maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas. Sebaliknya jika kurang dari 10, maka tidak ada multikolinier antarvariabel bebasnya.

Nilai VIF sendiri dihitung dengan formula berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1 - R_j^2)} \quad (3)$$

dengan j bergerak dari 1, 2, 3, ... hingga sebanyak k variabel bebasnya, sedangkan R^2 adalah koefisien determinasi variabel bebas ke- j dengan variabel bebas lainnya.

Uji selanjutnya adalah normalitas. Uji ini bertujuan untuk memeriksa apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan dua cara untuk mendeteksi normalitas, yakni dengan melihat grafik normal P-P plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam grafik normal P-P plot, jika titik-titik residual yang menggambarkan probabilitas secara kumulatif menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal, maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya jika titik-titik jauh dari garis diagonal, maka tidak berdistribusi normal. Sementara dalam uji Kolmogorov-Smirnov, hipotesis nolnya adalah *error term* terdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya adalah *error term* tidak terdistribusi normal. Uji Kolmogorov Smirnov dihitung melalui program SPSS. Jika nilai signifikansi $\leq \alpha$, maka H_0 ditolak yang berarti residual dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi $> \alpha$, maka H_0 diterima yang berarti residual berdistribusi normal.

Uji ketiga adalah pemeriksaan heteroskedastisitas. Asumsi regresi linier yang harus dipenuhi lainnya adalah semua residual atau *error* mampu

nyai varian yang sama. Jika kondisi ini terpenuhi, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika tidak terpenuhi, maka disebut heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mende- teksi adanya heteroskedastisitas. Uji Park dilaku- kan dengan cara meregresikan nilai residual dalam bentuk logaritma natural residual ($\ln e_i^2$) dengan logaritma natural semua variabel bebasnya ($\ln X_i$). Hipotesis nol yang digunakan dalam pengujian Park ini adalah residual atau *error* mempunyai va- rian yang sama (homoskedastisitas) dan hipotesis alternatifnya adalah residual atau *error* mempunyai varian yang tidak sama (heteroskedastisitas). De- ngan bantuan program SPSS, hasil Uji Park dilihat. Jika nilai signifikansi $\leq \alpha$, maka hipotesis nol ditolak yang berarti heteroskedastisitas. Sebaliknya jika ni- lai signifikansi $> \alpha$, maka H_0 diterima yang berarti homoskedastisitas.

Uji terakhir adalah memeriksa kelinieran. Uji li- nieritas adalah salah satu pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah spesifika- si model yang terbentuk sudah tepat atau tidak. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk menge- tahui apakah antarvariabel dalam model tersebut memiliki hubungan linier atau tidak. Uji linieritas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *scatterplot* terhadap residual untuk melihat apakah hubungan antarvariabel linier atau tidak. Gambar *scatterplots* yang baik adalah menunjukkan hubungan antara nilai prediksi terstandar (*standardized estimate*) de- ngan residu terstandar (*standardized residuals*) yang harus menunjukkan pola yang acak.

Pengujian Statistik

Ada dua pengujian statistik dalam analisis regresi linier berganda, yakni uji simultan (disebut pula Uji F) dan uji parsial (disebut pula uji t). Uji simultan atau uji secara serempak dilakukan untuk menge- tahui signifikansi pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hi- potesis nol dalam uji F penelitian adalah seluruh

variabel bebas (persentase pengusaha perempuan, persentase perempuan di parlemen, dan persenta- se perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi) tidak berpengaruh secara nyata terhadap IPM perempuan. Hipotesis alterna- tifnya adalah minimal terdapat satu variabel bebas tersebut berpengaruh nyata terhadap IPM perem- puan. Statistik uji F_{hitung} , dihitung dengan formula berikut:

$$F_{hit} = \frac{\frac{ESS}{(k-1)}}{\frac{RSS}{(n-k)}} \quad (4)$$

ESS adalah *Explained Sum of Squares*; RSS merupa- kan *Residual Sum of Squares*; k adalah jumlah variabel ditambah intersep, yakni sebanyak 4; dan n adalah jumlah observasi, yakni sebanyak 514. Ketentuan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut: jika nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka hipotesis nol diterima, sebaliknya jika F_{hitung} lebih besar sa- ma dengan F_{tabel} , maka hipotesis nol ditolak. Cara lain untuk mengambil keputusan dalam penguji- an adalah dengan melihat nilai signifikansi pada hasil pengolahan dari SPSS. Jika nilai signifikansi lebih rendah dari sama dengan taraf 5 persen, maka hipotesis nol ditolak, begitu pula sebaliknya.

Jika uji F hasilnya menolak hipotesis nol sehingga kesimpulannya adalah minimal terdapat satu vari- abel bebas berpengaruh nyata terhadap IPM, maka uji parsial atau t akan dilanjutkan. Uji t dilakukan untuk mengetahui besaran nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas sehingga dapat diketahui berapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial dan signifikansinya terhadap IPM. Ada tiga hipotesis nol dalam pengujian ini. *Perta- ma*, persentase pengusaha perempuan mempunyai pengaruh nyata terhadap IPM perempuan. *Kedua*, persentase perempuan di parlemen mempunyai pengaruh nyata terhadap IPM perempuan. *Ketiga*, persentase perempuan sebagai tenaga manajer, pro- fesional, administrasi, dan teknisi mempunyai pe- ngaruh nyata terhadap IPM perempuan. Hipotesis alternatif masing-masing variabel bebasnya tidak

mempunyai pengaruh terhadap IPM perempuan. Statistik uji t dihitung dengan formula berikut:

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)} \quad (5)$$

Notasi b menunjukkan koefisien regresi, sedangkan $se(b)$ adalah *standard error* dari variabel bebasnya dengan i bergerak dari 1, 2, dan 3. Hipotesis nol akan ditolak bila nilai t_{hitung} dengan derajat bebas $(n - k)$ lebih kecil dari sama dengan nilai t_{tabel} pada taraf $\alpha/2$. Sebaliknya, hipotesis nol diterima jika nilai t_{hitung} dengan derajat bebas $(n - k)$ lebih besar dari nilai t_{tabel} pada taraf $\alpha/2$. Cara lain untuk mengambil keputusan dalam pengujian adalah dengan melihat nilai signifikansi pada hasil pengolahan dari SPSS. Jika nilai signifikansi lebih rendah dari sama dengan taraf 5 persen, maka hipotesis nol ditolak.

Hasil dan Analisis

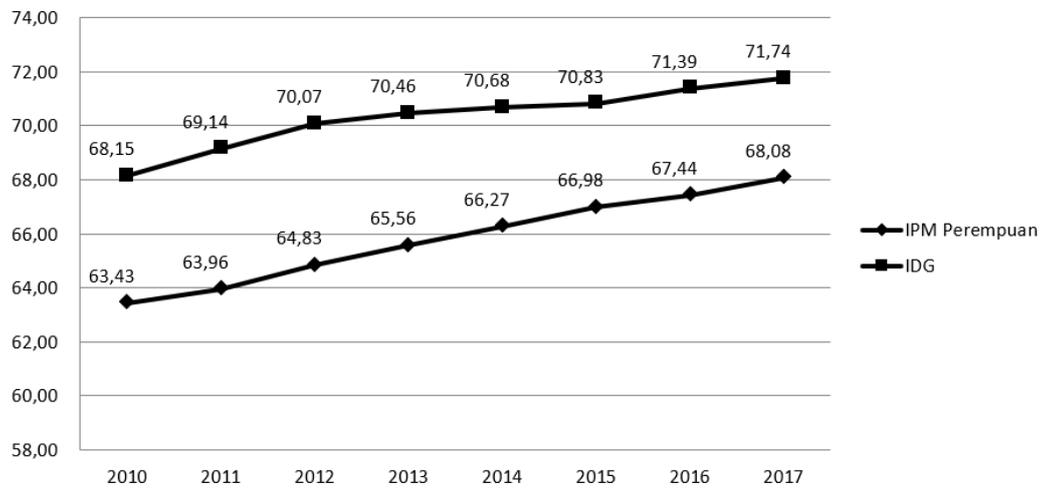
Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Terciptanya dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Partisipasi perempuan dalam kebijakan, program, dan pengambilan keputusan sangatlah penting untuk menjunjung persamaan HAM (UN, 2014). Salah satu indikator untuk melihat keadilan dan keberpihakan pada perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), atau dalam publikasi UNDP disebut sebagai *Gender Empowerment Measure* (GEM). IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian bidang ekonomi, politik, maupun sebagai pengambil keputusan.

Angka IDG terus meningkat selama periode 2010–2017 di Indonesia (Gambar 3). Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas perempuan Indonesia makin membaik. Meskipun jika dilihat sebaran antarkabupaten/kota terlihat variasi yang cukup tinggi,

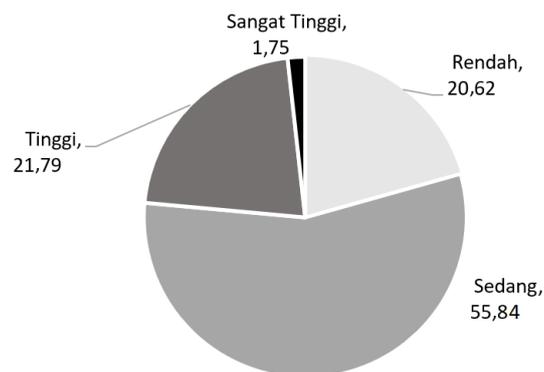
bahkan beberapa wilayah mengalami kondisi yang lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, IDG tertinggi diraih oleh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dengan nilai 86,20, sedangkan IDG terendah dimiliki Kabupaten Asmat, Papua dengan nilai 28,71. Angka IDG di Kabupaten Asmat mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Pada tahun 2010, IDG Asmat pernah mencapai 39,84. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya ketiga aspek pemberdayaan (ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan) di kabupaten tersebut.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas perempuan. Kapabilitas perempuan yang diukur dengan IPM menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Rata-rata pertumbuhan IPM perempuan Indonesia selama tahun 2010–2017 mencapai 1,02 persen. Namun, jika dilihat per wilayah, terlihat masih adanya disparitas yang cukup tinggi. Capaian IPM perempuan di Kabupaten Nduga, Papua hanya sekitar 26,82, sangat kontras dengan capaian Kota Yogyakarta yang mencapai 84,71 atau terkategori sangat tinggi (lebih dari 80). Kabupaten/kota yang memiliki kategori IPM perempuan sangat tinggi sekitar 1,75 persen, sedangkan wilayah dengan kategori IPM perempuan rendah sebanyak 20,62 persen (Gambar 4).

Dari sejumlah 106 kabupaten/kota dengan IPM perempuan kategori rendah, 11 di antaranya tidak memiliki keterwakilan perempuan di parlemen (Tabel 1). Wilayah tersebut mayoritas berada di Kepulauan Maluku dan Papua. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting agar suara perempuan dapat mewakili kepentingan kaumnya dengan harapan akan mengurangi diskriminasi yang dialaminya (*World Bank*, 2011). Dari keseluruhan kabupaten/kota, terdapat 23 wilayah yang tidak ada kursi parlemen yang diduduki perempuan. Selain itu, 153 wilayah lainnya hanya memiliki keterwakilan perempuan kurang dari 10 persen. Ada beberapa



Gambar 3. IDG dan IPM Perempuan Indonesia Tahun 2010–2017
Sumber: BPS (2019), diolah



Gambar 4. Persentase Kabupaten/Kota Menurut Kategori IPM Perempuan Tahun 2017
Sumber: BPS (2019), diolah

faktor yang menghambat partisipasi perempuan di dunia politik, di antaranya adalah norma yang berlaku di masyarakat, kemampuan/kualitas perempuan itu sendiri yang belum mampu bersaing, dan aspek *social network* (World Bank, 2011).

Salah satu norma umum yang berlaku di masyarakat adalah adanya anggapan bahwa politik hanya untuk laki-laki dan persepsi bahwa laki-laki adalah pemimpin yang lebih baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab sedikitnya jumlah pemimpin perempuan di Indonesia. Misalnya saja, pada tingkat desa, jumlah kepala desa perempuan masih

sangat terbatas. Berdasarkan hasil pendataan *Potensi Desa (Podes) 2018* yang dilakukan BPS, baru 28 kabupaten/kota dengan persentase kepala desa perempuan lebih dari 30 persen. Sementara itu, dari 106 wilayah yang memiliki nilai IPM rendah, 75 di antaranya memiliki kepala desa kurang dari 10 persen. Menurut Dewi (2017) dan Silouw (2016), kepala desa perempuan berperan penting dalam memberdayakan perempuan di desa yang dipimpinnya. Sebagai seorang perempuan, kepala desa tersebut dapat merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan lainnya sehingga kebijakan yang akan

diambil lebih tepat sasaran.

Sementara itu, ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi dapat dilihat dari persentase perempuan sebagai pengusaha dan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Wilayah yang memiliki angka IPM perempuan sangat tinggi memiliki aspek pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang cukup baik. Hal ini tergambar dari banyaknya kabupaten/kota yang memiliki IPM perempuan terkategori sangat tinggi dan memiliki persentase perempuan sebagai pengusaha dan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi di atas 40 persen. Sebaliknya, wilayah dengan IPM perempuan rendah memiliki *share* perempuan sebagai tenaga profesional dan pengusaha juga rendah (kurang dari 40 persen).

Hubungan Pemberdayaan Perempuan dengan IPM Perempuan

Sebelum analisis regresi diterapkan, pemeriksaan terhadap asumsi klasik harus dilakukan. Asumsi pertama yang diuji adalah multikolinieritas. Pemeriksaan ini dengan melihat nilai VIF yang dihasilkan dari pengolahan dengan SPSS (dapat dilihat pada Tabel 2).

Hasil pengolahan menunjukkan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas di bawah 10. Dengan demikian, tidak ada gejala multikolinier atau korelasi antarvariabel bebasnya. Asumsi selanjutnya adalah memeriksa heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan cara meregresikan nilai residual dalam bentuk logaritma natural residual ($\ln e_i^2$) dengan logaritma natural semua variabel bebasnya ($\ln X_i$). Hasil pengolahan menggunakan SPSS dapat dilihat pada Tabel 3.

Hasil pengujian menyimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 5 persen untuk variabel persentase pengusaha perempuan dan persentase

perempuan di parlemen. Sementara nilai signifikansi untuk persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi di atas 1 persen. Asumsi ketiga yang diperiksa adalah normalitas residual. Untuk memeriksanya digunakan grafik normal P-P plot dan uji Kolmogorov-Smirnov.

Grafik normal P-P plot pada Gambar 5 menunjukkan titik-titik dari probabilitas kumulatif dari residu observasi (*observed cumulatif probability*) berada di sekitar garis dari probabilitas kumulatif dari residu yang diharapkan (*expected cumulatif probability*). Ini artinya residual berdistribusi normal. Uji keduanya adalah dengan Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengolahan menghasilkan nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.

Karena nilai signifikansi dari pengujian normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov di atas taraf 5 persen, maka hipotesis nol diterima. Dengan demikian, residual dalam regresi berdistribusi normal.

Pemeriksaan terakhir adalah linearitas. Pemeriksaan linieritas adalah salah satu pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang terbentuk sudah tepat atau tidak. Penelitian ini menggunakan *scatterplot* antara nilai prediksi terstandar (*standardized estimate*) dengan residu terstandar (*standardized residuals*). Hasil pengolahan dengan SPSS menunjukkan pola yang cukup acak (Gambar 6). Titik-titik cukup menyebar, meskipun sebagiannya terpusat pada beberapa titik. Dengan demikian, asumsi linearitas dapat terpenuhi.

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, analisis dengan regresi linear berganda dapat dilanjutkan. Ada dua pengujian statistik yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda, yakni uji simultan atau serentak menggunakan statistik uji F dan uji parsial masing-masing variabel bebasnya dengan menggunakan statistik uji t.

Karena nilai signifikansi (0,000) di bawah taraf 5 persen, maka hipotesis nol ditolak. Dengan de-

Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kategori IPM Perempuan dan Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2017

Indikator Pemberdayaan Perempuan Menurut Kategori (1)	Kategori IPM Perempuan				Jumlah (6)
	Rendah (<60,00) (2)	Sedang (60,00–69,99) (3)	Tinggi (70,00–79,99) (4)	Sangat Tinggi (≥80,00) (5)	
Persentase Perempuan di Parlemen ^[1]					
Tidak ada	11	11	1	0	23
0,01-10,00%	35	85	31	2	153
10,00–29,99%	56	182	65	7	310
≥30%	4	9	15	0	28
Jumlah	106	287	112	9	514
Persentase Kepala Desa Perempuan ^[2]					
Tidak ada	10	3	3	0	16
0,01-10,00%	65	116	12	0	193
10,00–29,99%	19	137	41	4	201
≥30%	12	31	56	5	104
Jumlah	106	287	112	9	514
Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi ^[1]					
<40%	51	37	6	0	94
40,00–49,99%	33	116	61	8	218
≥50%	22	134	45	1	202
Jumlah	106	287	112	9	514
Persentase Pengusaha Perempuan ^[3]					
<40%	66	97	17	3	183
40,00–49,99%	31	130	68	4	233
≥50%	9	60	27	2	98
Jumlah	106	287	112	9	514

Sumber: ^[1] BPS (2019), diolah;

^[2] diolah dari hasil pendataan *Potensi Desa 2018*;

^[3] diolah dari hasil *Sensus Ekonomi 2016-Lanjutan*.

Tabel 2. Nilai VIF Menurut Variabel Bebas

Variabel Bebas (1)	Nilai VIF (2)
Persentase pengusaha perempuan	1,156
Persentase perempuan di parlemen	1,029
Persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi	1,126

Tabel 3. Nilai Signifikansi Pengujian Heteroskedastisitas Menurut Variabel Bebas

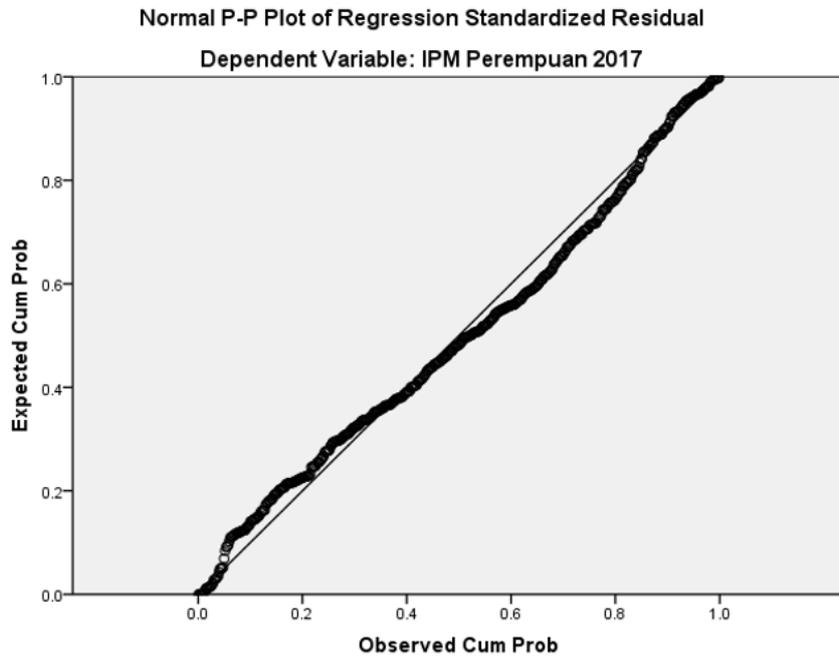
Variabel Bebas (1)	Nilai Signifikansi (2)
Persentase pengusaha perempuan	0,575
Persentase perempuan di parlemen	0,051
Persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi	0,022

Tabel 4. Hasil Pengolahan Uji Kolmogorov-Smirnov

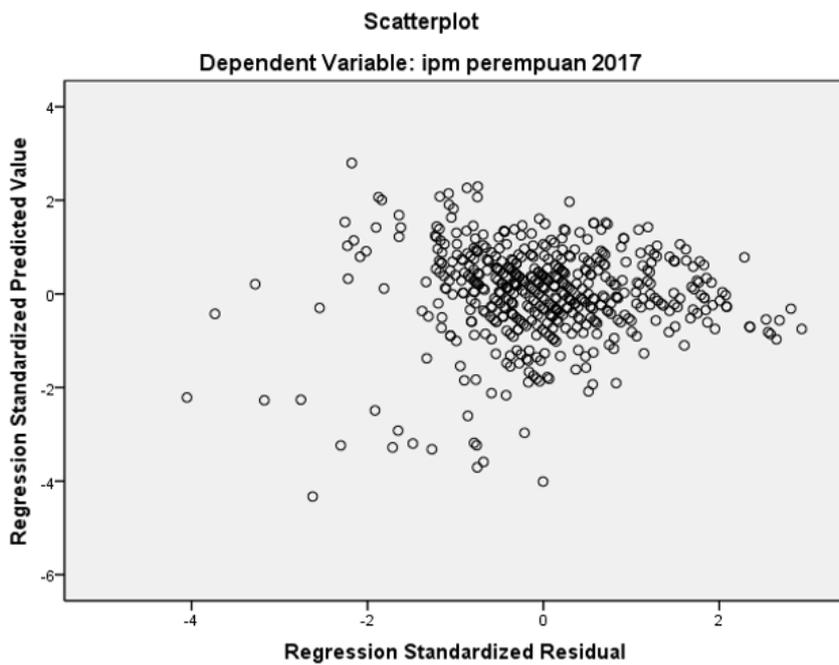
Item Pengujian (1)	Nilai (2)
Kolmogorov-Smirnov	1,214
Signifikansi	0,105

mikian, minimal ada 1 nilai koefisien yang tidak bernilai 0, atau dengan kata lain, model regresi lini-er berganda ini signifikan secara statistik sehingga

analisis dapat dilanjutkan uji parsial untuk melihat hubungan antara IPM perempuan dengan persentase pengusaha perempuan, persentase perempuan



Gambar 5. Normal P-P Plot dari Residu Terstandarisasi



Gambar 6. Scatter Plot antara Nilai Prediksi IPM Perempuan Terstandarisasi dengan Nilai IPM Perempuan Observasi

Tabel 5. Tabel Anova

Variabel (1)	Jumlah Kuadrat (<i>Sum of Squares</i>) (2)	Derajat Bebas (3)	F (4)	Nilai Signifikansi (5)
Regresi	9.607,13	3		
Residual	25.735,64	510	63,461	0,000
Total	35.342,78	513		

di parlemen, dan persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknis.

Uji parsial masing-masing variabel bebas adalah signifikan pada taraf 1 persen. Dengan demikian, keputusan pengujian adalah menolak hipotesis nol. Ini artinya, setiap variabel bebas yang diajukan (persentase pengusaha perempuan, persentase perempuan di parlemen, dan persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknis) masing-masingnya mempunyai hubungan dengan IPM perempuan. Tahap selanjutnya adalah memberikan interpretasi hasil dan bagaimana hubungan yang terjadi antara setiap variabel bebas dengan IPM perempuan.

Variabel persentase perempuan sebagai pengusaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Jika persentase perempuan sebagai pengusaha meningkat 1 persen, maka nilai IPM perempuan akan naik sebesar 0,206. Penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap kualitas hidup perempuan secara umum. Perempuan sebagai pengusaha memberikan arti bahwa perempuan mempunyai inisiasi dalam mengambil peran dan aktif dalam kegiatan ekonomi tanpa harus bergantung dengan orang lain. Perempuan sebagai pengusaha mampu lebih mandiri dan mempunyai penghasilan sendiri. Meningkatnya persentase perempuan sebagai pengusaha akan mendorong meningkatnya pendapatan perempuan itu sendiri. Pada akhirnya akan dapat mengungkit IPM perempuan, khususnya pada dimensi ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rizqi & Tusianti (2019) yang menunjukkan bahwa persentase pengu-

saha perempuan signifikan memengaruhi daya beli perempuan secara makro di suatu wilayah.

Variabel persentase perempuan di parlemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Jika persentase perempuan di parlemen meningkat 1 persen, maka nilai IPM perempuan akan naik sebesar 0,196. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa partisipasi perempuan dalam politik memberikan pengaruh terhadap kualitas perempuan. Perempuan yang duduk sebagai anggota parlemen, diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi perempuan pada tingkat legislatif. Perempuan lebih peka dan lebih memahami permasalahan atau isu sensitif yang dihadapi kaumnya. Sebagai anggota parlemen, perempuan juga mempunyai posisi tawar yang tinggi dan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan, seperti akses sekolah, kesehatan, dan pekerjaan (Rahmaniah, 2016). Peran perempuan di parlemen juga dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Asiedu *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen mampu mendorong terciptanya kebijakan yang responsif gender. Kebijakan responsif gender pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Variabel persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknis berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Jika persentase tenaga profesional meningkat 1 persen, maka nilai IPM perempuan akan naik sebesar 0,298. Tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknis merupakan jenis posisi/jabatan penting termasuk dalam kerangka *decent work* (pekerjaan layak). Jenis posisi ini secara-

Tabel 6. Estimasi Parameter Model Regresi Linier Berganda IPM Perempuan Tahun 2017

Variabel (1)	Regresi Linier Berganda (2)
Konstanta	38,986 (1,931)
Persentase perempuan sebagai pengusaha	0,206*** (0,039)
Persentase perempuan di parlemen	0,196*** (0,038)
Persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi	0,298*** (0,035)
Jumlah Observasi	514
Adjusted R ²	0,268

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%

Angka dalam kurung () menunjukkan nilai *standard error*

ra umum mempunyai kedudukan strategis dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini membuktikan bahwa perempuan dengan jenis pekerjaan tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup perempuan secara umum. Bahkan, daya ungkit variabel ini adalah paling besar dibandingkan dua variabel lainnya. Perempuan yang mengisi jabatan ini sebagian besar berlatar pendidikan yang mumpuni serta memiliki keahlian yang spesial. Perempuan dengan jabatan tersebut juga umumnya mempunyai pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan jabatan di bawahnya. Sehingga, perempuan yang mengisi jabatan-jabatan pekerjaan sebagai manajer, profesional, administrasi, dan teknisi menunjukkan perempuan yang berkualitas tinggi. Hal inilah yang mendorong meningkatnya IPM perempuan baik pada dimensi pendidikan maupun ekonomi (daya beli).

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai pengusaha, persentase perempuan di parlemen, dan persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Dengan memperhatikan latar belakang penelitian ini, yakni masih rendahnya kualitas hidup perempuan serta

adanya kesenjangan dalam pemberdayaan gender, maka rekomendasi penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup perempuan yang direpresentasikan oleh angka IPM dengan memperhatikan aspek pemberdayaan perempuannya. Prioritas pertama adalah pada sektor ekonomi karena daya dorongnya cukup besar terhadap IPM perempuan.

Peran perempuan sebagai pengusaha sekaligus mengisi posisi jabatan manajer, profesional, administrasi, dan teknisi harus terus diupayakan. Peran ini makin kuat ketika perempuan mempunyai keahlian dan pendidikan formal yang mumpuni. Oleh karenanya, hak-hak perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi agar dapat diupayakan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum hawa. Pendidikan yang tinggi kepada perempuan harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya, agar dapat meningkatkan kapabilitasnya.

Kesimpulan ini memberikan indikasi terhadap pentingnya pendidikan. Makin tinggi pendidikan, makin tinggi pula peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi, dan teknisi. Dengan pendidikan pula seorang perempuan mampu menciptakan peluang usaha dan kemudian menjadi seorang pengusaha. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antaranya bahkan akan merekrut perempuan-perempuan lainnya untuk bekerja sebagai manajer,

tenaga profesional, administrasi, dan teknis. Implikasi penting dari temuan ini adalah setiap perempuan di Indonesia, di mana pun berada, terutama di daerah perdesaan, terus didorong agar dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pada sektor politik, peran perempuan sebagai anggota parlemen juga terus dilanjutkan. Amanat 30 persen wakil perempuan di parlemen bukan hanya formalitas. Beberapa daerah yang keterwakilan perempuannya sangat rendah haruslah menjadi perhatian. Siapa yang menjadi wakil rakyat di parlemen sangat bergantung dengan pilihan rakyat. Oleh karena itu, calon legislatif perempuan harus mampu mengambil hati para pemilihnya.

Pilihan masyarakat terhadap figur calon legislatif kadang kala masih terbentur dengan politik uang. Pada situasi seperti ini, perempuan berada pada posisi yang tidak berdaya. Bukan hanya karena ketidakmampuan secara finansial, namun juga karena rendahnya minat perempuan masuk ke dalam dunia politik. Ada dua implikasi yang muncul untuk mengatasi problem ini. *Pertama*, harus dibangun kesadaran berpolitik di kalangan perempuan, bahwa peran perempuan di panggung politik adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan perempuan, baik bagi perempuan itu sendiri maupun perempuan secara keseluruhan. *Kedua*, perlu dibangunnya iklim politik yang sehat, bersantun, dan bermoral. Selama ini masih berlaku isu siapa yang mempunyai modal besar, maka orang itulah yang menang. Sudah saatnya politik uang diminimalisasi. Uang hanya dinikmati sesaat oleh si pemilih. Namun, masyarakat akan menanggung dari hasil pilihannya selama lebih kurang lima tahun. Sudah saatnya, calon legislator menampilkan program-program. Jika demikian, maka perempuan harus mengambil peran besar dalam menampilkan program unggulannya. Program yang memberikan kemaslahatan langsung kepada masyarakat, maka calon itulah yang dipilih. Pada akhirnya, perempuan dapat bersaing sehat dengan kaum laki-laki

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 21 No. 2 Juli 2021, hlm. 204–219

dalam merebut simpati pemilih.

Jika perempuan berdaya di aspek ekonomi dan politik, maka kualitas perempuan Indonesia yang tercermin pada IPM dipastikan akan terus meningkat. Terlebih lagi pemerintah telah menargetkan dalam RPJMN 2020–2024 bahwa kualitas perempuan Indonesia harus terus meningkat sampai tahun 2025 untuk mengejar kesetaraan gender. Dengan demikian, meningkat saja belum cukup. IPM perempuan harus berakselerasi dan tumbuh lebih cepat dibandingkan IPM laki-laki agar perempuan dapat mengejar ketertinggalannya.

Penelitian ini sendiri memiliki kekurangan, yakni tidak melihat pengaruh dari peran pemimpin perempuan di tingkat desa. Padahal Rizqi & Tusianti (2019) mendapatkan adanya hubungan signifikan antara persentase kepala desa perempuan terhadap tingkat kesejahteraan yang juga merupakan bagian dari kualitas hidup perempuan pada Provinsi Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, dan Maluku pada tahun 2017. Variabel persentase kepala desa perempuan tidak masuk ke dalam penelitian karena adanya beberapa asumsi klasik yang dilanggar. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel ini, tetapi perlu usaha ekstra untuk mendapatkan model alternatif selain dengan metode *ordinary least square* (OLS).

Daftar Pustaka

- [1] Asiedu, E., Branstette, C., Gaekwad-Babulal, N., & Malokele, N. (2016). The effect of women's representation in parliament and the passing of gender sensitive policies. *Paper presented at 2018 ASSA Annual Meeting, Philadelphia, 5-7 Januari 2018*. Diakses 12 September 2019 dari <https://www.aeaweb.org/conference/2018/preliminary/paper/an5yEb5h>.
- [2] Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2012). Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India. *Science*, 335(6068), 582-586. doi: 10.1126/science.1212382.
- [3] BPS. (2017). *Kajian awal indeks ketimpangan gender 2016*. Badan Pusat Statistik.
- [4] BPS. (2019). *Gender: Tabel/Indikator*. Badan Pusat Statistik.

- Diakses pada 12 September 2019 dari <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>.
- [5] Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x>.
- [6] Choudhary, A. (2010). Impact of women heads-of-state on human development. *Global Journal of Business Research*, 4(4), 71-79.
- [7] Dewi, R. A. (2017). *Kepemimpinan perempuan dalam kemajuan Desa Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu* (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung).
- [8] Elliott, C. M. (Ed.). (2007). *Global empowerment of women: Responses to globalization and politicized religions*. Routledge.
- [9] Gerrity, J. C., Osborn, T., & Mendez, J. M. (2007). Women and representation: A different view of the district?. *Politics & Gender*, 3(2), 179-200. doi: 10.1017/S1743923X07000025.
- [10] Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- [11] Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024: Indonesia berprestasi menengah - tinggi yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses 12 September 2019 dari <https://www.bappenas.go.id/files/rpjmnn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024.Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf>.
- [12] Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91-132. doi: <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>.
- [13] KPPPA & BPS. (2018). *Pembangunan manusia berbasis gender 2017*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses 12 September 2019 dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/067e7-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2017.pdf>.
- [14] Rahmaniah, S. E. (2016, 7 April). Pendidikan politik berperspektif gender. *TheTanjungpuraTimes.com*. Diakses 12 September 2019 dari <https://thetanjungpuratimes.com/2016/04/07/pendidikan-politik-berperspektif-gender/>.
- [15] Rizqi, M., & Tusianti, E. (2019). *Pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku tahun 2017*. STIS.
- [16] Seguino, S. (2000). Accounting for gender in Asian economic growth. *Feminist Economics*, 6(3), 27-58. doi: <https://doi.org/10.1080/135457000750020128>.
- [17] Silouw, Y. S. F. (2016). Peran kepala desa dalam pemberdayaan perempuan (Suatu studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modioinding Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1-18.
- [18] Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Gramedia Pusataka Utama.
- [19] Thanikaivel, M., & Priya, K. (2018). Economic empowerment of women In India. *International Journal of Technical Research & Science*, 3(7), 251-253. doi: 10.30780/IJTRS.V3.I7.2018.014.
- [20] UN. (2014). *World survey on the role of women in development 2014: Gender equality and sustainable development*. United Nations. Diakses 12 September 2019 dari <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/10/world-survey-2014>.
- [21] UNDP. (1996). *Human development report 1996: Economic growth and human development*. United Nations Development Programme. Diakses 12 September 2019 dari <http://www.hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1996>.
- [22] UNDP. (2018). *Human development indices and indicators: 2018 statistical update*. United Nations Development Programme. Diakses 12 September 2019 dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf.
- [23] World Bank. (2011). *World development report 2011: Conflict, security, and development*. World Bank. Diakses 12 September 2019 dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4389>.
- [24] Yogendrarajah, R. (2013). Women empowerment through decision making. *International Journal of Economics and Business Management*, 3(1).